

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. A. (2021). Slippery Slope Framework: Motivasi Pembayaran Pajak Dan Kepatuhan Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(1), 92–101.
- Amrul, R., Hidayanti, A. A., dan Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada BAPENDA Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 69–89.
- Arisandy, N. (2018). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Asriyani, Y., dan Susena, K. C. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 136–145. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.279>
- Averti, A. R., dan Suryaputri, R. V. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>
- Berutu, D. A., dan Harto, P. (2012). Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Budiarso, N., dan Napitupulu, L. S. (2015). Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Sebagai Pajak Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 463–472.
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Salemba Empat.
- Cynthia, P. N., dan Djauhari, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Smooting (Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah)*, 18(4), 352–362. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/82169>
- Damanik, E. S. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 303. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.326>
- Dewi, D. A. A. K. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Dan Kepuasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb Di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2017. *Parameter*, 5(2), 117–131. <https://doi.org/10.37751/parameter.v5i2.154>
- Ersania, G. A. R., dan Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1882. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p0>

- Fadilah, dan Panjaitan, I. (2016). Pengaruh Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 14–28.
- Fitria, P. A., dan Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Economics and Bankin*, 1(1), 47–54.
- Fitrianiingsih, F., Sudarno, S., dan Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Ghassani, N. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram). *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen*, 6(01). <https://doi.org/10.30996/jmm.v6i01.2448>
- Harefa, M. (2016). Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 67–82.
- Hartini, O. S., dan Sopian, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi*, X(1), 21–39.
- Hartono, J. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta : BPFE.
- Heider, F. (1958). *The Psychology Of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Heryati, Y. (2022). *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju*. 1(1), 10–19.
- Hunt, D. P. (2003). The concept of knowledge and how to measure it. *Journal of Intellectual Capital*, 4(1), 100–113. <https://doi.org/10.1108/14691930310455414>
- Khasanah, U., T, S., dan Mardiaty, E. (2019). Coercive Authority and Trust in Tax Authority in Influencing Voluntary Tax Compliance: A Study of Slippery Slope. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1). <https://doi.org/10.18196/jai.2001109>
- Kolatung, J. F. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(2), 1006–1014.
- Kurniawan. (2019). *Pahami Ketentuannya hindari Sanksinya : Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mumu, A., Jullie J. Sondakh, dan I Gede Suwetja. (2020). Pengaruh

Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 15(2), 175–184. <https://doi.org/10.1142/S0217751X20500220>

- Neuman, W. L. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Index.
- Nisak, C., dan Rahmi Satiti, A. D. (2018). Pengaruh Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb P2 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2017). *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 633. <https://doi.org/10.30736/jpensi.v3i1.130>
- Nugroho, A., Andini, R., dan Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting*, 2(2), 1–13.
- Nurlela, S. (2014). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma*, 11(02).
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 1 Tahun 2013, tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), 1 (2013).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2 255 (2009).
- Pratama, V. M., dan Kurnia. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kewajiban Moral Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di KPP Pratama Kuningan Tahun 2021). *E-Proceeding of Management*, 9(2), 509–517.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 142–151. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>
- Prima Putri, N., Tanno, A., dan Kurniawan, R. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Benefita*, 4(2), 386. <https://doi.org/10.22216/jbe.v4i2.4228>
- Purba, I. C., Ilat, V., dan Gamaliel, H. (2018). Pengaruh Reinventing Policy, Sikap Rasional, Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04), 235–243. <https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20119.2018>
- Puspita. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Universitas Negeri Padang*, 1–126.
- Qur'aniza Putri, R., dan Venusita, L. (2021). Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan WP PBB Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal*

Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi, 1(1), 1–15.

- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan aspek formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahman, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, Vol 6, No, 9–25.
- Ramadhan, M. S., Samsudin, dan Laili, R. (2022). Analysis Of Determinants Affecting Rural And Urban Land And Building Taxpayer Compliance In Dompu Regency With Taxpayer Awareness As A Moderating Variable Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaa. *Jurnal Multi Disiplin Madani*, Vol 2 No 1(1), 1–22.
- Ramdhani, P. E. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi yang Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Subang. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(6), 22–33. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma%0AANALISIS>
- Ratnasari, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern , Kualitas Pelayanan Fiskus , Kesadaran Wajib. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01(03), 11–21.
- Rawls, J. (2005). *A Theory of Justice* (edisi revi). Cambridge: Belknap Press.
- Richardson, G. (2006). The impact of tax fairness dimensions on tax compliance behavior in an Asian jurisdiction: the case of Hong Kong. *International Tax Journal*, 32(1), 29–42.
- Ristyorini, A. (2018). *Faktor Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Robbins, S., dan Judge, T. (2015). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, N. R., M, A., dan Silvera, D. L. (2021). Pengaruh Sanksi Administrasi Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kota Padang. *Pareso Jurnal*, 3(2), 315–328. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Sasmita, R. I. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di Kantor PT Bali Jaya Transindo Surabaya). *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, 3(10), 1022–1037.
- Sekaran, U., dan Bougie, R. (2020). *Research Methods For Business : A Skill Building Approach*. Hoboken: Wiley.
- Serem, W., Robert, K., dan Phillip, O. (2017). The Effect of Tax System Simplicity on Tax Compliance Among the Rental Income Earners in Kenya. A Case of Eldoret Central Business District. *European Journal of Business and Innovation Research*, 5(5), 13–22. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Setiaji, K., dan Nisak, A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan

- Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. *Ekuitas – Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 11–23.
- Simon, J., dan Clinton, A. (2004). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2, 27–42.
- Subandi, H., dan Fadhil, M. I. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i1.5402>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafira, E. Z. A., dan Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1), 79–91. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.10256>
- Syahdan, S. A., dan Rani, A. P. (2014). Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 Dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal InFestasi*, 10(1), 64–72.
- Taringot. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating. In *Tesis*.
- Utami, S., dan Amanah, L. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(4), 1–22.
- Wahyuni. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Bongaya Journal for Research in Accounting*, 1(2), 1–7.
- Wardani, D. K., dan Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.
- Wardani, D. K., dan Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wardani, E., Yuesti, A., dan Sudiartana, I. M. (2015). Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Konteks Tri Hita Karana Di KPP Pratama Badung Selatan. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi STIE Triatma Mulya*, 21(2), 99–112.
- Yunita Sari, N. P., dan Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(16), 310–339. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01.p12>

- Zahrani, N. R., dan Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19.
<http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>
- Zamrodah, Y. (2018). *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. 15(2), 1–23.

Lampiran 1. Peta Teori

NO	Penulis/Topik/ Judul Buku/Artikel	Tujuan Penelitian/ Penulisan Buku/Artikel	Konsep/Teori/ Hipotesis	Variabel Penelitian dan Teknik Analisis	Hasil Penelitian/Isi Buku
1.	Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Cynthia dan Djauhari, 2020)	Untuk mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak, sosialisasi, kualitas pelayanan dan pajak sanksi atas kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Theory of Reasoned Action 2. Social Learning Theory 3. Pendapatan Wajib Pajak 4. Sosialisasi 5. Kualitas Pelayanan 6. Sanksi Pajak <p><u>Hipotesis :</u></p> <p>H1: Pendapatan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H2: Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H3: Kualitas pelayanan</p>	<p><u>Independen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Wajib Pajak 2. Sosialisasi 3. Kualitas pelayanan 4. Sanksi Pajak <p><u>Dependen :</u></p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Berdasarkan hasil analisis, bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Sosialisasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kualitas layanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan

			berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak H4: Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak		wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
2.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu (Asriyani dan Susena, 2016)	Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu	<u>Teori/Konsep :</u> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Pengetahuan Wajib Pajak 3. Kualitas Pelayanan 4. Tingkat Penghasilan 5. Sanksi Pajak <u>Hipotesis :</u> H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak H2: Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan	<u>Independen :</u> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Pengetahuan Wajib Pajak 3. Kualitas pelayanan 4. Tingkat Penghasilan 5. Sanksi Perpajakan <u>Dependen :</u> Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Berbanding terbalik dengan variabel kualitas pelayanan dan tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap

			<p>terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H3: Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H4: Tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H5: Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>		<p>kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak</p>
3.	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, dan Sanksi Pajak</p>	<p>Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sistem administrasi</p>	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Modernisasi Perpajakan 3. Pengetahuan Wajib Pajak 4. Sanksi Perpajakan <p><u>Hipotesis :</u></p>	<p><u>Independen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak 2. Pengetahuan Wajib Pajak 3. Kualitas pelayanan 	<p>Berdasarkan hasil pengujian diperoleh data bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan</p>

	<p>Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar (Wahyuni, 2018)</p>	<p>perpajakan modern, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Tengah</p>	<p>H1: Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar H2: Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar H3: Kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar H4: Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya Makassar</p>	<p>fiskus 4. Sanksi Perpajakan <u>Dependen :</u> Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Makassar Tengah</p>
--	---	---	--	--	---

4.	Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat (Amrul <i>et al.</i> , 2020)	Untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, sanksi dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak 2. Pajak Bumi dan Bangunan 3. Sanksi Pajak 4. Pelayanan Pajak 5. Kepatuhan Wajib Pajak <p><u>Hipotesis :</u></p> <p>H1: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H2: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H3: Pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H4: Pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas</p>	<p><u>Independen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Wajib Pajak 2. Sanksi Perpajakan 3. Pelayanan <p><u>Dependen :</u></p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2
----	--	---	--	---	--

			<p>elayanan fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>		
5	<p>Pengaruh Kualitas pelayanan fiskus, Sosialisasi dan Kepuasan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pbb Di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi Tahun 2017 (Dewi, 2021)</p>	<p>Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi dan kepuasan baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Kecamatan Bekasi Timur</p>	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Perpajakan 2. Kepatuhan Pajak 3. Kualitas pelayanan fiskus 4. Sosialisasi Pajak 5. Kepuasan <p><u>Hipotesis :</u></p> <p>H1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H3: Terdapat pengaruh positif</p>	<p><u>Independen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan fiskus 2. Sosialisasi Pajak 3. Kepuasan <p><u>Dependen :</u></p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak; kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi dan kepuasan secara simultan</p>

			<p>dan signifikan kepuasan terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H4: Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi dan kepuasan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak</p>		berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	<p>Pengaruh Kesadaran Dan Kualitas pelayanan fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB P2 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2017) (Nisak</p>	<p>Untuk mengetahui pengaruh kesadaran dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan tahun 2017</p>	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori perpajakan 2. Pajak Bumi dan Bangunan 3. Kewajiban Moral 4. Kepatuhan Wajib Pajak 5. Kualitas pelayanan fiskus <p><u>Hipotesis :</u></p> <p>H1: Kesadaran secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2</p>	<p><u>Independen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran 2. Kualitas pelayanan fiskus <p><u>Dependen :</u></p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan tahun 2017, baik secara parsial maupun simultan.</p>

	<p>dan Rahmi Satiti, 2018)</p>		<p>H2: Kualitas pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2</p> <p>H3: Kesadaran dan kualitas pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2</p>	<p>Dengan demikian, pemerintah hendaknya melakukan upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB P2 dengan cara menggencarkan sosialisasi, penyuluhan, serta pemberian pengetahuan dan pemahaman terkait dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB P2 serta meningkatkan kualitas pelayanan fiskus agar wajib pajak merasa lebih puas dan nyaman, serta merasa dipermudah dalam</p>
--	--------------------------------	--	--	--

					membayar PBB P2
7.	Pengaruh Penerapan Kualitas pelayanan fiskus Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor PT Bali Jaya Transindo Surabaya) (Sasmita, 2019)	Untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Penerapan Kualitas pelayanan fiskus, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor PT Bali Jaya Transindo Surabaya.	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak 2. Fungsi Pajak 3. <i>Official Assesment System</i> 4. Kualitas pelayanan fiskus 5. Kepatuhan Wajib Pajak <p><u>Hipotesis :</u></p> <p>H1: Pengaruh Kualitas pelayanan fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>H2: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>H3: Pengaruh Penerapan Kualitas pelayanan fiskus Dan KesadaranWajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p><u>Independen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan fiskus 2. Kesadaran Wajib Pajak <p><u>Dependen :</u></p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya pengaruh variabel Kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor PT Bali Jaya Transindo Kesadaran Wajib Pajak 2. Adanya pengaruh variabel Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak di kantor PT Bali Jaya Transindo. 3. Adanya pengaruh Kualitas pelayanan fiskus dan Kesadaran wajib pajak secara

					simultan terhadap Kepatuhan wajib pajak.
8.	Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi (Damanik, 2021)	Untuk menguji pengaruh sistem administrasi modern, keadilan, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Jambi	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2. Wajib Pajak 3. Kepatuhan Wajib Pajak <p><u>Hipotesis :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Sistem Administrasi Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota jambi 2. Pengaruh Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota jambi 3. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota jambi 	<p><u>Independen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan fiskus 2. Keadilan Pajak 3. Akuntabilitas 4. Sanksi Perpajakan <p><u>Dependen :</u></p> Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sistem administrasi modern, keadilan, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

			4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi		
9.	Pengaruh Penerapan Kualitas pelayanan fiskus, Kualitas pelayanan fiskus Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM (Ratnasari, 2020)	Untuk mengetahui pengaruh tingkat penerapan kualitas pelayanan fiskus, kualitas pelayanan fiskus fiskus, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar pada Kantor	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Theory Of Planned Behavior</i> 2. Pajak 3. Kualitas pelayanan fiskus 4. Kualitas Pelayanan Fiskus 5. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 6. Kesadaran Pajak 7. Tingkat Penghasilan 8. Sanksi Perpajakan 9. Kepatuhan Wajib Pajak <p><u>Hipotesis :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Kualitas pelayanan fiskus 	<p><u>Independen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan fiskus 2. Kualitas pelayanan fiskus Fiskus 3. Kesadaran Wajib Pajak 4. Tingkat Penghasilan 5. Sanksi Perpajakan <p><u>Dependen :</u> Kepatuhan WAJIB PAJAKOP UMKM</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa kualitas pelayanan fiskus, kualitas pelayanan fiskus fiskus, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, dan sanksi perpajakan, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

		Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subang tahun 2018	<p>Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM</p> <p>3. Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM</p> <p>4. Tingkat Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM</p> <p>5. Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM</p>		
10.	Pengaruh Kualitas pelayanan fiskus, Akuntabilitas Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Prima Putri <i>et al.</i> , 2019)	Untuk menganalisa pengarus kualitas pelayanan fiskus, akuntabilitas dan sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya	<p><u>Teori/Konsep</u></p> <p>1. Teori Atribusi</p> <p><u>Hipotesis :</u></p> <p>1. Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>2. Pengaruh akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib</p>	<p><u>Independen :</u></p> <p>1. Kualitas pelayanan fiskus</p> <p>2. Akuntabilitas</p> <p>3. Sanksi Perpajakan</p> <p><u>Dependen :</u></p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa system administrasi perpajakan modern, akuntabilitas dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dan

		wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dan pekerjaan bebas	pajak 3. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak		simultan.
11.	Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kabupaten Bojonegoro) (Qur'aniza Putri dan Venusita, 2021)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan prosedural, distributif dan retributif terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh kepercayaan	<u>Teori/Konsep :</u> 1. <i>Fairness Heuristic Theory</i> 2. Persepsi Keadilan Prosedural 3. Persepsi Keadilan Distributif 4. Rasio Keuangan Daerah Persepsi Keadilan Retributif 5. Kepercayaan 6. Kepatuhan Wajib Pajak <u>Hipotesis :</u> 1. Kepercayaan memoderasi pengaruh antara persepsi keadilan prosedural terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan di Sukorejo, Bojonegoro	<u>Independen :</u> 1. Persepsi Keadilan Prosedural 2. Persepsi Keadilan Distributif 3. Persepsi Keadilan Retributif <u>Dependen :</u> Kepatuhan Wajib Pajak <u>Moderasi :</u> Kepercayaan	Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan <i>fairness heuristic theory</i> apabila diterapkan pada wajib pajak bumi bangunan di Sukorejo, Bojonegoro. Hasil penelitian ini menolak semua hipotesis penelitian dan mendapat kesimpulan bahwa kepercayaan tidak mampu memoderasi pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak sejalan

			<p>2. Kepercayaan memoderasi pengaruh antara persepsi keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan di Sukorejo, Bojonegoro</p> <p>3. Kepercayaan memoderasi pengaruh antara persepsi keadilan retributif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi bangunan di Sukorejo, Bojonegoro</p>		<p>dengan <i>fairness heuristic theory</i> yang menyatakan bahwa masyarakat dengan kepercayaan yang rendah akan lebih mengamati bagaimana keadilan dilakukan untuk pengambilan keputusan. Selain itu, menurut hasil penelitian persepsi keadilan prosedural, distributif, retributif dan kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan tidak dapat memoderasi pengaruh persepsi keadilan</p>
--	--	--	--	--	---

					prosedural, distributif, dan retributif terhadap kepatuhan wajib pajak.
12.	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Fitria dan Supriyono, 2019)	Untuk menguji pengaruh pemahaman pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak di Kabupaten Purbalingga	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Pembelajaran Sosial 2. <i>Theory Of Planned Behavior</i> <p><u>Hipotesis :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 	<p><u>Independen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Peraturan 2. Persepsi Tarif Pajak 3. Keadilan Pajak <p><u>Dependen :</u> Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak. Persepsi atas tarif pajak mempengaruhi secara negatif kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak, sedangkan variabel keadilan pajak tidak mampu mempengaruhi kepatuhan pelaku umkm dalam membayar pajak.

13.	<p><i>Slippery Slope Framework</i>: Motivasi Pembayaran Pajak Dan Kepatuhan Pajak (Amalia, 2021)</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris yang melatarbelakangi kepatuhan pajak didasarkan dengan <i>slippery slope framework</i>, yaitu motivasi membayar pajak karena adanya kekuasaan (power) dari pemerintah atau atas kesadaran dari wajib pajak itu sendiri</p>	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Slippery Slope Framework</i> 2. Kepatuhan Pajak <p><u>Hipotesis :</u></p> <p>Motivasi pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak</p>	<p><u>Independen :</u></p> <p>Motivasi Pembayaran Pajak</p> <p><u>Dependen :</u></p> <p>Kepatuhan Pajak</p>	<p>Hasil penelitian memberikan bukti empiris yaitu motivasi pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya hasil wawancara terhadap beberapa pelaku UMKM yang menjadi responden menyatakan bahwa pembayaran pajak didasarkan oleh power yang dimiliki oleh pemerintah. Dapat dikatakan bahwa motivasi pembayaran pajak belum didasarkan atas kesadaran wajib pajak</p>
14.	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi</p>	<p>Untuk mengetahui pengaruh motivasi,</p>	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Bumi dan Bangunan 	<p><u>Independen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa</p>

	Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Setiaji dan Nisak, 2017)	SPPT, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Desa Nolakerto	2. Kesadaran Wajib Pajak Hipotesis : 1. Motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. SPPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	2. SPPT 3. Pelayanan Fiskus 4. Kesadaran Wajib Pajak Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak	motivasi, SPPT, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB P2 di Desa Nolakerto baik secara parsial maupun simultan
15.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam	Untuk menguji analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	Teori/Konsep 1. Pajak Bumi dan Bangnan 2. Sosialisasi Perpajakan 3. Kesadaran Wajib Pajak	Independen : 1. Sosialisasi Perpajakan 2. Pemahaman	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman

	<p>Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Pravasanti, 2020)</p>	<p>bumi dan bangunan di Desa Tawengan</p>	<p>4. Sanksi Pajak</p> <p>Hipotesis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Pengaruh pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 	<p>Prosedur Perpajakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kesadaran Wajib Pajak 4. Sanksi Pajak <p>Dependen :</p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel prosedur perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.</p>
--	--	---	---	--	--

16.	Pengaruh Kualitas pelayanan fiskus, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas pelayanan fiskus Fiskus Pada Kepatuhan WPOP (Yunita Sari dan Jati, 2019)	Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus fiskus pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Atribusi 2. Kualitas pelayanan fiskus 3. Pengetahuan Perpajakan 4. Kualitas pelayanan fiskus Fiskus <p><u>Hipotesis :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur 	<p><u>Independen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas pelayanan fiskus 2. Pengetahuan Perpajakan 3. Kualitas pelayanan fiskus Fiskus <p><u>Dependen :</u> Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
-----	--	---	--	--	--

			3. Kualitas pelayanan fiskus fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur		
17.	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Manado (Kolatung, 2021)	Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntansi Perpajakan 2. Pajak 3. Fungsi Pajak 4. Wajib Pajak 5. Wajib Pajak Orang Pribadi 6. Wajib Pajak Badan 7. Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak 8. Pajak Bumi dan Bangunan 		Hasil penelitian menunjukkan bahwa Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan bangunan di Kota bahwa tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak PBB semakin meningkat karena sebagian besar masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai warga Indonesia yang baik dan mereka sadar bahwa pajak adalah bentuk

					partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk lebih baik maju dan berkembang
18.	Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas pelayanan fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Syafira dan Nasution, 2021)	Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Prama Cikarang Selatan	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntansi Perpajakan 2. Sanksi Perpajakan 3. Kualitas pelayanan fiskus 4. Kepatuhan Wajib Pajak <p><u>Hipotesis :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 2. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 3. Sanksi Pajak dan Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak 	<p><u>Independen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Perpajakan 2. Kualitas pelayanan fiskus <p><u>Dependen :</u> Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Hasil analisis menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan dan Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

19.	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Subang (Ramdhani, 2020)	Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Subang	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Theory Of Planned Behavior</i> (TPB) 2. Teori Atribusi 3. Pengetahuan Perpajakan 4. Pemahaman Wajib Pajak 5. Kesadaran Wajib Pajak 6. Sikap Wajib Pajak 7. Kualitas pelayanan fiskus 8. Sanksi Pajak 9. Tingkat Ekonomi 10. Nasionalisme <p><u>Hipotesis :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 2. Hubungan Pemahaman Wajib Pajak dengan 	<p><u>Independen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan, 2. Pemahaman Wajib Pajak, 3. Kesadaran Wajib Pajak, 4. Sikap Wajib Pajak, 5. Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum, 6. Kualitas pelayanan fiskus Fiskus 7. Sanksi, 8. Tingkat Ekonomi, 9. Nasionalisme. <p><u>Dependen :</u></p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Hasil analisis menunjukkan bahwa bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Subang
-----	--	--	--	---	---

			<p>Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2</p> <p>3. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2</p> <p>4. Hubungan Sikap Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2</p> <p>5. Hubungan Tingkat Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Hukum dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2</p> <p>6. Hubungan Kualitas pelayanan fiskus Fiskus dengan Kepatuhan Wajib</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Pajak Dalam Membayar PBB-P2</p> <p>7. Hubungan Sanksi Denda dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2</p> <p>8. Hubungan Tingkat Ekonomi dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2</p> <p>9. Hubungan Nasionalisme dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2</p>		
20.	Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas pelayanan fiskus Dan Sanksi	Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Theory Of Planned Behavior</i> 2. Pajak 3. Fungsi Pajak 4. Sistem Pemungutan Pajak 	<p><u>Independen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Pajak 2. Pengetahuan Pajak 3. Kualitas pelayanan fiskus 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh

	<p>Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Zahrani dan Mildawati, 2019)</p>	<p>pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi</p>	<p>5. Pemahaman Pajak 6. Pengetahuan Pajak 7. Kualitas pelayanan fiskus 8. Sanksi Pajak 9. Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><u>Hipotesis :</u></p> <p>1. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan</p>	<p>4. Sanksi Pajak</p> <p><u>Dependen :</u> Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan pajak maka semakin mudah wajib pajak untuk memahami peraturan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena kualitas pelayanan fiskus tidak menjamin wajib pajak untuk taat membayar pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena masih</p>
--	---	---	--	--	--

			wajib pajak		kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak meningkat
21.	Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, Dan Kualitas pelayanan fiskus Terhadap Kepatuhan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Utami dan Amanah, 2018)	Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Atribusi 2. Teori Perilaku Terencana 3. Teori Belajar Sosial 4. Kesadaran Wajib Pajak 5. Kepatuhan Wajib Pajak 6. Sosialisasi Pajak 7. Pengetahuan Pajak 8. Kualitas pelayanan fiskus <p><u>Hipotesis :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pajak berpengaruh positif 	<p><u>Independen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pajak 2. Pengetahuan Pajak 3. Kualitas pelayanan fiskus <p><u>Dependen :</u> Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p><u>Variabel Intervening :</u> Kesadaran Wajib Pajak</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

			<p>terhadap kesadaran wajib pajak</p> <p>2. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak</p> <p>3. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak</p> <p>4. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>5. Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>6. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif</p>		<p>Kesadaran wajib pajak memiliki peran mediasi dalam hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, kesadaran wajib pajak tidak memiliki peran mediasi dalam hubungan antara sosialisasi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
--	--	--	---	--	--

			<p>terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>7. Sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak</p>		
22.	<p>Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota</p>	<p>Untuk menguji pengaruh dari pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan</p>	<p><u>Teori/Konsep :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PBB-P2 2. Kepatuhan Wajib Pajak <p><u>Hipotesis :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib 2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 	<p><u>Independen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Pelayanan Fiskus 3. Sanksi Denda <p><u>Dependen :</u></p> <p>Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sanksi denda secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib</p>

	Pasuruan (Fitrianingsih <i>et al.</i> , 2018)	perkotaan di Kota Pasuruan	3. Pengaruh Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak		pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi denda secara simultan atau bersama - sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
23.	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Sonder	Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak akan kepatuhan pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	<p><u>Teori/Konsep</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori Atribusi 2. Teori Pembelajaran Sosial 3. <i>Theory Of Planned Behavior</i> <p><u>Hipotesis :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan 	<p><u>Independen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan 2. Sanksi Pajak 3. Kesadaran Wajib Pajak <p><u>Dependen :</u> Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran pajak Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar tanah dan bangunan pajak di Kecamatan Sonder,

	Kabupaten Minahasa (Mumu <i>et al.</i> , 2020)		<p>bangunan.</p> <p>2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.</p> <p>3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.</p>		Kabupaten Minahasa.
--	---	--	---	--	---------------------

Lampiran 2. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN TESIS

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN MAMUJU**

disusun dan diajukan oleh

**HASRI
A062202016**



kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

KUESIONER PENELITIAN

Kepada

Yth. Bapak / Ibu Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tesis pada Program Magister Akuntansi di Universitas Hasanuddin, maka peneliti sangat mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan sedikit waktu guna mengisi kuisisioner yang saya sertakan ini di tengah kesibukan Bapak/Ibu pada saat bertugas. Kuisisioner ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah, oleh karena itu jawaban yang Bapak/Ibu berikan sangat besar manfaatnya bagi pengembangan ilmu dan penelitian saya. Kuisisioner ini tidak ada hubungannya dengan status dan kedudukan di tempat kerja, sehingga saya berharap Bapak/Ibu mengisi kuisisioner ini dengan lengkap dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sesuai etika penelitian, maka data yang diperoleh akan kami jaga kerahasiaannya dan hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian saja. Data tersebut akan dianalisis dan disajikan secara agregat bukan secara individu.

Peneliti mengucapkan terima kasih atas segala kerjasama dan bantuan yang telah Bapak/Ibu berikan dalam penelitian ini.

Makassar, 2022

Hormat saya,

HASRI

Petunjuk Pengisian

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan atas pernyataan yang ada pada kuesioner ini sesuai dengan keadaan, pendapat, perasaan Bapak/Ibu sebenarnya, bukan berdasarkan pendapat umum atau pendapat orang lain. Pernyataan-pernyataan dalam kuesioner ini mempunyai lima alternatif jawaban yaitu (SS) = Sangat setuju, (S) = Setuju, (N) = Netral, (TS) = Tidak setuju, (STS) = Sangat tidak setuju. Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan jawaban dalam kuesioner dibawah ini sesuai dengan keadaan, pendapat, perasaan Bapak/Ibu.

Data Responden

Harap memberi tanda "X" pada pilihan jawaban sesuai kondisi Bapak/Ibu/Saudara(i) saat ini

Umur (Tahun)

- 21-34 tahun
 35 -45
 Diatas 45 tahun

Jenis Kelamin

- Laki-laki
 Perempuan

Bidang Pekerjaan

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mengurus Rumah Tangga | <input type="checkbox"/> Karyawan Honorer |
| <input type="checkbox"/> ASN | <input type="checkbox"/> Karyawan Swasta |
| <input type="checkbox"/> Petani | <input type="checkbox"/> Pensiunan |
| <input type="checkbox"/> Nelayan | <input type="checkbox"/> Lainnya |
| <input type="checkbox"/> Wiraswasta | |

Pendidikan Terakhir

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> SD | <input type="checkbox"/> Sarjana (S1) / Diploma IV |
| <input type="checkbox"/> SMP | <input type="checkbox"/> Magister (S2) |
| <input type="checkbox"/> SMA | <input type="checkbox"/> Doktoral (S3) |
| <input type="checkbox"/> Diploma (DI/DII/DIII) | |

1. Keadilan Pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1.	Saya percaya bahwa penentuan tarif PBB-P2 sudah sesuai sektor NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)					
2.	Saya percaya bahwa penentuan PBB-P2 sudah sesuai kelas / tipe bangunan (mewah atau sederhana)					
3.	Saya selalu diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan dan penundaan dalam membayar pajak					

Sumber : Ristyorini (2018)

2. Sanksi Pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1..	Menurut saya pengenaan sanksi pajak harus dilakukan secara tegas kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran					
2.	Menurut saya pengenaan denda 2% per bulan apabila terlambat membayar pajak adalah wajar					
3.	Sanksi pajak mampu membuat saya tidak mengulangi kesalahan atas keterlambatan pembayaran PBB-P2					

Sumber : Putri dan Venusita (2021)

3. Pengetahuan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1.	Saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah					
2.	Saya mengetahui tarif PBB-P2 yang akan saya bayar					

5.	Saya mengetahui dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)					
----	---	--	--	--	--	--

Sumber : Khasanah (2014)

4. Kesadaran Wajib Pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1.	Saya menyadari pemungutan PBB-P2 akan kembali ke masyarakat (manfaat pajak) untuk membangun fasilitas umum dan lainnya					
2.	Penundaan membayar PBB-P2 sangat merugikan daerah, karena PBB-P2 merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah seperti dana kesehatan, pendidikan, dan lainnya yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat					
3.	Saya membayar PBB-P2 dengan tulus ikhlas dan senang hati tanpa ada beban					

Sumber : Wardani dan Romiyatun (2017)

5. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
1.	Saya tidak mempunyai tunggakan PBB-P2					
2.	Saya membayar PBB-P2 tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo					
3.	Saya membayar PBB-P2 sesuai dengan jumlah yang tertera di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2					
4.	Saya setuju apabila terlambat atau tidak membayar PBB-P2 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan undang-undangan					
5.	Saya bersedia memberi informasi tentang objek pajak yang saya miliki kepada petugas Pajak					

Sumber : Purnamasari (2016)

Lampiran 3. Rekapitulasi Data Kuesioner

Rekap Data Variabel Keadilan Pajak

Responden	Keadilan Pajak (X1)			
	KP1	KP2	KP3	Total
1	2	2	3	7
2	3	3	3	9
3	3	3	3	9
4	4	4	4	12
5	5	5	5	15
6	4	4	4	12
7	4	3	4	11
8	4	4	4	12
9	5	5	5	15
10	5	4	4	13
11	4	4	4	12
12	4	3	4	11
13	5	4	4	13
14	4	4	4	12
15	4	4	4	12
16	4	4	4	12
17	4	4	4	12
18	3	3	3	9
19	3	3	3	9
20	4	4	4	12
21	3	3	3	9
22	4	3	4	11
23	4	5	4	13
24	4	4	4	12
25	4	4	4	12
26	4	4	4	12
27	5	5	5	15
28	3	4	3	10
29	3	3	3	9
30	4	4	4	12
31	5	4	4	13
32	5	5	5	15
33	4	4	4	12
34	4	3	4	11
35	4	4	4	12
36	4	5	4	13
37	4	4	4	12
38	4	4	4	12
39	4	4	4	12
40	4	4	3	11
41	3	3	3	9
42	4	4	4	12

43	4	4	4	12
44	4	4	4	12
45	4	4	4	12
46	3	2	3	8
47	4	4	4	12
48	4	4	4	12
49	4	3	4	11
50	4	4	3	11
51	3	3	3	9
52	4	4	4	12
53	4	4	4	12
54	4	4	4	12
55	4	4	4	12
56	3	2	3	8
57	4	4	4	12
58	4	4	4	12
59	4	3	4	11
60	3	2	3	8
61	5	5	5	15
62	3	4	3	10
63	3	3	3	9
64	4	4	4	12
65	5	4	4	13
66	5	5	5	15
67	4	4	4	12
68	4	3	4	11
69	4	4	4	12
70	4	5	4	13
71	4	4	4	12
72	4	4	4	12
73	4	4	4	12
74	3	3	3	9
75	3	3	3	9
76	4	4	4	12
77	3	3	3	9
78	4	3	4	11
79	4	5	4	13
80	4	4	4	12
81	4	4	4	12
82	4	4	4	12
83	2	2	3	7
84	3	3	3	9
85	3	3	3	9
86	4	4	4	12
87	5	5	5	15
88	4	4	4	12
89	4	3	4	11

90	4	4	4	12
91	5	5	5	15
92	5	4	4	13
93	4	4	4	12
94	4	3	4	11
95	5	4	4	13
96	4	4	4	12
97	4	4	4	12
98	4	4	4	12
99	4	4	4	12
100	4	4	4	12

Rekap Data Variabel Sanksi Pajak

Responden	Sanksi Pajak (X2)			
	SP1	SP2	SP3	Total
1	2	2	4	8
2	3	3	3	9
3	4	3	3	10
4	4	4	4	12
5	5	5	5	15
6	4	4	4	12
7	2	3	3	8
8	4	3	4	11
9	5	3	5	13
10	5	5	4	14
11	5	3	5	13
12	4	3	3	10
13	5	4	4	13
14	3	3	3	9
15	4	4	4	12
16	5	5	5	15
17	4	3	4	11
18	4	3	4	11
19	3	3	3	9
20	4	4	4	12
21	3	3	3	9
22	5	4	4	13
23	4	4	4	12
24	5	4	5	14
25	4	2	3	9
26	4	3	3	10
27	5	5	5	15
28	2	3	3	8

29	4	3	3	10
30	4	4	4	12
31	5	4	4	13
32	5	4	3	12
33	4	3	4	11
34	5	4	4	13
35	4	2	4	10
36	5	4	4	13
37	4	4	4	12
38	4	2	2	8
39	4	4	4	12
40	5	4	4	13
41	4	3	4	11
42	4	4	4	12
43	5	3	5	13
44	5	5	5	15
45	2	5	5	12
46	4	4	4	12
47	4	4	4	12
48	4	4	4	12
49	4	4	4	12
50	5	4	4	13
51	4	3	4	11
52	4	4	4	12
53	5	3	5	13
54	5	5	5	15
55	2	5	5	12
56	4	4	4	12
57	4	4	4	12
58	4	4	4	12
59	4	4	4	12
60	4	4	4	12
61	5	5	5	15
62	2	3	3	8
63	4	3	3	10
64	4	4	4	12
65	5	4	4	13
66	5	4	3	12
67	4	3	4	11
68	5	4	4	13
69	4	2	4	10
70	5	4	4	13
71	4	4	4	12
72	4	2	2	8
73	4	4	4	12
74	4	3	4	11
75	3	3	3	9

76	4	4	4	12
77	3	3	3	9
78	5	4	4	13
79	4	4	4	12
80	5	4	5	14
81	4	2	3	9
82	4	3	3	10
83	2	2	4	8
84	3	3	3	9
85	4	3	3	10
86	4	4	4	12
87	5	5	5	15
88	4	4	4	12
89	2	3	3	8
90	4	3	4	11
91	5	3	5	13
92	5	5	4	14
93	5	3	5	13
94	4	3	3	10
95	5	4	4	13
96	3	3	3	9
97	4	4	4	12
98	5	5	5	15
99	4	3	4	11
100	4	4	4	12

Rekap Data Variabel Pengetahuan Wajib Pajak

Responden	Pengetahuan Wajib Pajak (X3)			
	PWP1	PWP2	PWP3	Total
1	3	4	2	9
2	3	3	3	9
3	4	2	3	9
4	4	4	4	12
5	5	5	5	15
6	4	4	4	12
7	4	2	4	10
8	4	4	4	12
9	4	3	4	11
10	4	4	4	12
11	3	3	3	9
12	4	4	3	11
13	5	4	3	12
14	4	3	4	11
15	4	3	4	11
16	5	5	5	15
17	3	3	3	9
18	4	4	4	12

19	3	3	3	9
20	4	4	4	12
21	4	3	3	10
22	4	5	4	13
23	4	5	4	13
24	5	3	4	12
25	3	3	3	9
26	4	4	4	12
27	5	5	5	15
28	3	4	3	10
29	5	4	4	13
30	4	4	4	12
31	5	3	4	12
32	5	5	4	14
33	3	4	4	11
34	4	3	3	10
35	4	2	4	10
36	5	4	4	13
37	4	4	4	12
38	4	4	4	12
39	4	4	4	12
40	4	3	4	11
41	3	3	3	9
42	4	5	4	13
43	5	4	3	12
44	5	4	4	13
45	5	5	5	15
46	5	5	5	15
47	4	4	4	12
48	4	3	3	10
49	5	4	4	13
50	4	3	4	11
51	3	3	3	9
52	4	5	4	13
53	5	4	3	12
54	5	4	4	13
55	5	5	5	15
56	5	5	5	15
57	4	4	4	12
58	4	3	3	10
59	5	4	4	13
60	5	5	5	15
61	5	5	5	15
62	3	4	3	10
63	5	4	4	13
64	4	4	4	12
65	5	3	4	12

66	5	5	4	14
67	3	4	4	11
68	4	3	3	10
69	4	2	4	10
70	5	4	4	13
71	4	4	4	12
72	4	4	4	12
73	4	4	4	12
74	4	4	4	12
75	3	3	3	9
76	4	4	4	12
77	4	3	3	10
78	4	5	4	13
79	4	5	4	13
80	5	3	4	12
81	3	3	3	9
82	4	4	4	12
83	3	4	2	9
84	3	3	3	9
85	4	2	3	9
86	4	4	4	12
87	5	5	5	15
88	4	4	4	12
89	4	2	4	10
90	4	4	4	12
91	4	3	4	11
92	4	4	4	12
93	3	3	3	9
94	4	4	3	11
95	5	4	3	12
96	4	3	4	11
97	4	3	4	11
98	5	5	5	15
99	3	3	3	9
100	4	4	4	12

Rekap Data Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Responden	Kesadaran Wajib Pajak (Y)					Total
	KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	
1	4	4	3	3	4	18
2	3	3	3	3	3	15
3	5	4	3	3	3	18
4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	5	25
6	4	4	4	4	4	20
7	3	3	3	3	4	16
8	4	4	4	3	4	19

9	3	4	4	4	4	19
10	3	3	4	3	4	17
11	4	3	3	3	3	16
12	4	4	4	4	4	20
13	4	4	4	5	4	21
14	4	4	4	3	4	19
15	4	4	4	4	4	20
16	5	5	5	5	5	25
17	3	3	3	3	3	15
18	4	4	4	4	4	20
19	3	3	3	3	3	15
20	4	4	4	4	4	20
21	4	3	3	3	3	16
22	4	5	5	5	4	23
23	4	4	4	4	4	20
24	4	5	5	5	5	24
25	4	4	3	3	3	17
26	4	4	4	4	4	20
27	5	5	5	5	5	25
28	4	3	3	4	3	17
29	3	3	4	3	4	17
30	4	4	4	4	4	20
31	4	4	4	5	4	21
32	4	5	5	4	4	22
33	5	5	5	4	4	23
34	4	4	4	3	4	19
35	4	4	4	2	4	18
36	4	4	4	4	4	20
37	4	4	4	4	4	20
38	4	4	4	4	4	20
39	4	4	4	4	4	20
40	4	3	4	4	3	18
41	4	4	4	3	4	19
42	4	4	4	4	4	20
43	3	4	4	4	4	19
44	5	5	5	5	5	25
45	4	4	4	4	4	20
46	5	5	5	5	5	25
47	4	4	4	4	4	20
48	4	4	4	3	3	18
49	4	3	4	4	4	19
50	4	3	4	4	3	18
51	4	4	4	3	4	19
52	4	4	4	4	4	20
53	3	4	4	4	4	19
54	5	5	5	5	5	25

55	4	4	4	4	4	20
56	5	5	5	5	5	25
57	4	4	4	4	4	20
58	4	4	4	3	3	18
59	4	3	4	4	4	19
60	5	5	5	5	5	25
61	5	5	5	5	5	25
62	4	3	3	4	3	17
63	3	3	4	3	4	17
64	4	4	4	4	4	20
65	4	4	4	5	4	21
66	4	5	5	4	4	22
67	5	5	5	4	4	23
68	4	4	4	3	4	19
69	4	4	4	2	4	18
70	4	4	4	4	4	20
71	4	4	4	4	4	20
72	4	4	4	4	4	20
73	4	4	4	4	4	20
74	4	4	4	4	4	20
75	3	3	3	3	3	15
76	4	4	4	4	4	20
77	4	3	3	3	3	16
78	4	5	5	5	4	23
79	4	4	4	4	4	20
80	4	5	5	5	5	24
81	4	4	3	3	3	17
82	4	4	4	4	4	20
83	4	4	3	3	4	18
84	3	3	3	3	3	15
85	5	4	3	3	3	18
86	4	4	4	4	4	20
87	5	5	5	5	5	25
88	4	4	4	4	4	20
89	3	3	3	3	4	16
90	4	4	4	3	4	19
91	3	4	4	4	4	19
92	3	3	4	3	4	17
93	4	3	3	3	3	16
94	4	4	4	4	4	20
95	4	4	4	5	4	21
96	4	4	4	3	4	19
97	4	4	4	4	4	20
98	5	5	5	5	5	25
99	3	3	3	3	3	15
100	4	4	4	4	4	20

Rekap Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Responden	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
	KWP1	KWP2	KWP3	Total
1	2	2	4	8
2	3	3	3	9
3	3	3	3	9
4	4	4	4	12
5	5	5	5	15
6	4	4	4	12
7	4	3	3	10
8	4	4	4	12
9	4	4	4	12
10	3	3	4	10
11	3	3	3	9
12	4	4	3	11
13	5	5	5	15
14	4	3	3	10
15	4	4	4	12
16	5	5	5	15
17	3	3	3	9
18	5	5	5	15
19	3	3	3	9
20	4	4	4	12
21	3	3	3	9
22	4	4	4	12
23	4	4	4	12
24	5	5	5	15
25	3	3	4	10
26	4	4	4	12
27	5	5	5	15
28	3	3	4	10
29	4	4	4	12
30	4	4	4	12
31	4	4	4	12
32	5	5	5	15
33	5	5	5	15
34	5	4	4	13
35	4	4	4	12
36	5	5	5	15
37	4	4	4	12
38	4	5	4	13
39	4	4	4	12
40	4	4	3	11
41	3	3	4	10

42	5	4	5	14
43	4	4	4	12
44	5	5	5	15
45	4	4	4	12
46	5	3	4	12
47	4	4	4	12
48	4	4	4	12
49	4	4	5	13
50	4	4	3	11
51	3	3	4	10
52	5	4	5	14
53	4	4	4	12
54	5	5	5	15
55	4	4	4	12
56	5	3	4	12
57	4	4	4	12
58	4	4	4	12
59	4	4	5	13
60	5	3	4	12
61	5	5	5	15
62	3	3	4	10
63	4	4	4	12
64	4	4	4	12
65	4	4	4	12
66	5	5	5	15
67	5	5	5	15
68	5	4	4	13
69	4	4	4	12
70	5	5	5	15
71	4	4	4	12
72	4	5	4	13
73	4	4	4	12
74	5	5	5	15
75	3	3	3	9
76	4	4	4	12
77	3	3	3	9
78	4	4	4	12
79	4	4	4	12
80	5	5	5	15
81	3	3	4	10
82	4	4	4	12
83	2	2	4	8
84	3	3	3	9
85	3	3	3	9
86	4	4	4	12
87	5	5	5	15
88	4	4	4	12

89	4	3	3	10
90	4	4	4	12
91	4	4	4	12
92	3	3	4	10
93	3	3	3	9
94	4	4	3	11
95	5	5	5	15
96	4	3	3	10
97	4	4	4	12
98	5	5	5	15
99	3	3	3	9
100	4	4	4	12

Lampiran 4. Statistik Hasil Penelitian

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.T	100	7.00	15.00	11.5400	1.75476
X2.T	100	8.00	15.00	11.5800	1.89726
X3.T	100	9.00	15.00	11.6700	1.78124
Y.T	100	15.00	25.00	19.7100	2.69416
Z.T	100	8.00	15.00	11.9800	1.97448
Valid N (listwise)	100				

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.0	2.0	2.0
	3.00	19	19.0	19.0	21.0
	4.00	65	65.0	65.0	86.0
	5.00	14	14.0	14.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	5	5.0	5.0	5.0
	3.00	24	24.0	24.0	29.0
	4.00	59	59.0	59.0	88.0
	5.00	12	12.0	12.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	23	23.0	23.0	23.0
	4.00	69	69.0	69.0	92.0
	5.00	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	8	8.0	8.0	8.0
	3.00	8	8.0	8.0	16.0
	4.00	52	52.0	52.0	68.0
	5.00	32	32.0	32.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	8	8.0	8.0	8.0
	3.00	36	36.0	36.0	44.0
	4.00	44	44.0	44.0	88.0
	5.00	12	12.0	12.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.0	2.0	2.0
	3.00	24	24.0	24.0	26.0
	4.00	56	56.0	56.0	82.0
	5.00	18	18.0	18.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	18	18.0	18.0	18.0
	4.00	53	53.0	53.0	71.0
	5.00	29	29.0	29.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	6	6.0	6.0	6.0
	3.00	30	30.0	30.0	36.0
	4.00	45	45.0	45.0	81.0
	5.00	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.0	2.0	2.0
	3.00	28	28.0	28.0	30.0
	4.00	59	59.0	59.0	89.0
	5.00	11	11.0	11.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	16	16.0	16.0	16.0
	4.00	69	69.0	69.0	85.0
	5.00	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	22	22.0	22.0	22.0
	4.00	59	59.0	59.0	81.0
	5.00	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	20	20.0	20.0	20.0
	4.00	61	61.0	61.0	81.0
	5.00	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.0	2.0	2.0
	3.00	32	32.0	32.0	34.0
	4.00	47	47.0	47.0	81.0
	5.00	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	20	20.0	20.0	20.0
	4.00	67	67.0	67.0	87.0
	5.00	13	13.0	13.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Z1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.0	2.0	2.0
	3.00	20	20.0	20.0	22.0
	4.00	51	51.0	51.0	73.0
	5.00	27	27.0	27.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Z2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	2	2.0	2.0	2.0
	3.00	27	27.0	27.0	29.0
	4.00	49	49.0	49.0	78.0
	5.00	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Z3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3.00	20	20.0	20.0	20.0
	4.00	56	56.0	56.0	76.0
	5.00	24	24.0	24.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

UJI VALIDITAS DAN REABILITAS**Correlations**

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.T
X1.1	Pearson Correlation	1	.750**	.872**	.938**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.750**	1	.748**	.912**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.872**	.748**	1	.930**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
X1.T	Pearson Correlation	.938**	.912**	.930**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.909	3

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.T
X2.1	Pearson Correlation	1	.402**	.453**	.786**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.402**	1	.571**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.453**	.571**	1	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
X2.T	Pearson Correlation	.786**	.816**	.816**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.724	3

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.T
X3.1	Pearson Correlation	1	.423**	.618**	.806**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.423**	1	.525**	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100

X3.3	Pearson Correlation	.618**	.525**	1	.848**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
X3.T	Pearson Correlation	.806**	.819**	.848**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.755	3

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y.T
Y1	Pearson Correlation	1	.701**	.546**	.500**	.470**	.742**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.701**	1	.826**	.636**	.735**	.911**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.546**	.826**	1	.702**	.813**	.912**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.500**	.636**	.702**	1	.651**	.837**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	.470**	.735**	.813**	.651**	1	.857**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.T	Pearson Correlation	.742**	.911**	.912**	.837**	.857**	1

Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.903	5

Correlations

		Z1	Z2	Z3	Z.T
Z1	Pearson Correlation	1	.815**	.691**	.921**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
Z2	Pearson Correlation	.815**	1	.733**	.936**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
Z3	Pearson Correlation	.691**	.733**	1	.877**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
Z.T	Pearson Correlation	.921**	.936**	.877**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.898	3

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.58180378	
Most Extreme Differences	Absolute	.118	
	Positive	.070	
	Negative	-.118	
Test Statistic		.118	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.110 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.102
		Upper Bound	.118

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

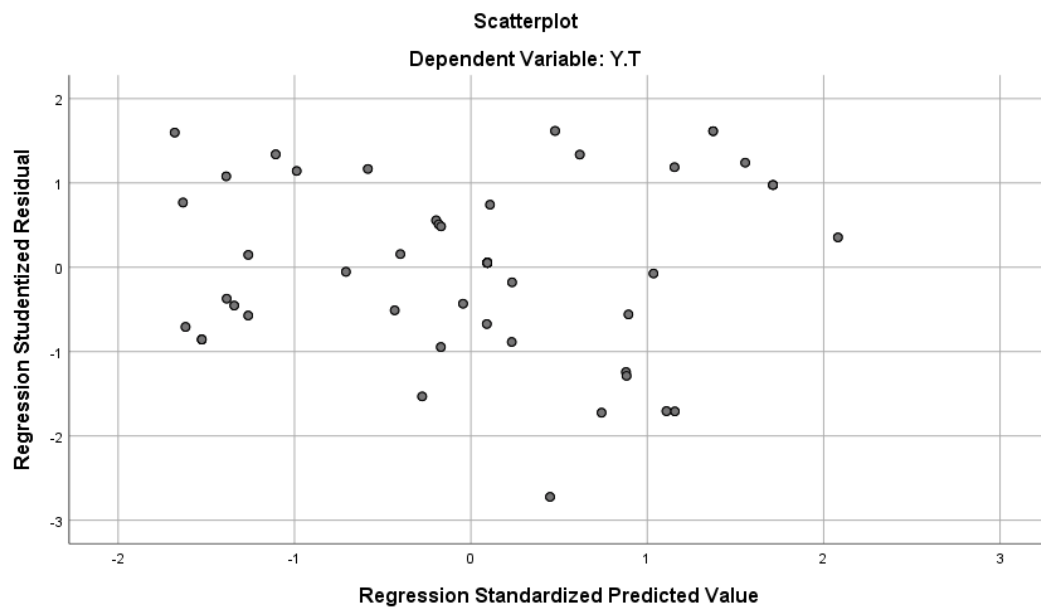
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	4.976	1.140		4.363	.000		
	X1.T	-.284	.102	-.185	-2.775	.007	.631	1.584
	X2.T	.319	.107	.224	2.987	.004	.496	2.017
	X3.T	.607	.119	.401	5.112	.000	.454	2.202
	Z.T	.604	.114	.443	5.314	.000	.403	2.480

a. Dependent Variable: Y.T

Uji Heterokedasitas



UJI HOPOTESIS SEBELUM MODERASI

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.857 ^a	.734	.723	1.41773

a. Predictors: (Constant), Z.T, X1.T, X2.T, X3.T

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	527.644	4	131.911	65.629	.000 ^b
	Residual	190.946	95	2.010		
	Total	718.590	99			

a. Dependent Variable: Y.T

b. Predictors: (Constant), Z.T, X1.T, X2.T, X3.T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.976	1.140		4.363	.000
	X1.T	-.284	.102	-.185	-2.775	.007
	X2.T	.319	.107	.224	2.987	.004
	X3.T	.607	.119	.401	5.112	.000
	Z.T	.604	.114	.443	5.314	.000

a. Dependent Variable: Y.T

UJI HIPOTESIS SESUDAH MODERASI**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.860 ^a	.740	.732	1.39442

a. Predictors: (Constant), X3.Z, X1.Z, X2.Z

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	531.928	3	177.309	91.190	.000 ^b
	Residual	186.662	96	1.944		
	Total	718.590	99			

a. Dependent Variable: Y.T

b. Predictors: (Constant), X3.Z, X1.Z, X2.Z

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.039	.548		21.955	.000
	X1.Z	-.021	.007	-.298	-2.840	.006
	X2.Z	.027	.008	.407	3.195	.002
	X3.Z	.048	.008	.726	6.277	.000

a. Dependent Variable: Y.T



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat
Mamuju 91512, Telp/ Fax : 0426-2325152, email : ptspsulawesibarat@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 00581/76.RP.PTSP.B/XI/2022

1. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 31).
2. Menimbang : Surat Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Nomor : 9762/UN4.4.1/PT.01.04/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 Perihal Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA:

- a. Nama/Objek : **HASRI**
- b. NIM/NIK : A062202016
- c. Alamat : Btn. Griya Masagena1 B.10 Mamuju
- d. No.HP : 085298228062
- e. Untuk : 1). Melakukan Penelitian/Pengumpulan Data
“ DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MAMUJU “
- 2). Lokasi Penelitian : Kabupaten Mamuju
- 3). Waktu/Lama Penelitian : **25 November s/d 25 Desember 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya Kami menyetujui Kegiatan tersebut dengan ketentuan :

Biaya Rp. 0

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
2. Penelitian tidak Menyimpang dari surat keterangan penelitian yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat Keterangan Penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat keterangan penelitian ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 25 November 2022

**a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
PROVINSI SULAWESI BARAT,**
Selaku Administrator Pelayanan Terpadu
Satu Pintu



Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19640408 198603 1 023

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Mamuju di Mamuju;
3. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Mamuju di Mamuju;
5. Kepala Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju di Mamuju;
6. Dekan FEB Universitas Hasanuddin Makassar di Makassar;
7. Peninggal;